

GUS DUR DAN CIVIL SOCIETY: PERAN KH ABDURRAHMAN WAHID DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Erwan Dwi Wahyunanto¹, Arik Dwijayanto², & Syamsul Wathoni³

¹²³ Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
Email: arikdj@insuriponorogo.ac.id

ABSTRACT

KH Abdurrahman Wahid, known as Gus Dur, played an essential role in Indonesia's Civil Society movement. Gus Dur has formed and led various social-community organizations and political organizations to manage public awareness in achieving prosperity. This article explores Gus Dur's thoughts on community empowerment during the New Order to Post-Reformation era. Gus Dur's idea has resulted in a more creative and innovative empowerment pattern without leaving the noble values of religious teachings and national culture, especially in the era of the industrial revolution 4.0 as it is today.

Keywords: *Empowerment, Abdurrahman Wahid, Civil Society*

PENDAHULUAN

Selama 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru pembangunan nasional terus digenjot oleh pemerintah. Salah satu fokus dari pembangunan tersebut ialah mengarah kepada upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional yang pada masa pemerintahan sebelumnya (Orde Lama) telah banyak mewariskan sejumlah persoalan perekonomian yang memburuk. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat yang hanya berkisar 70 dolar AS serta tingginya angka inflasi yang mencapai kisaran 65%. Hal tersebut diperparah oleh hancurnya sarana prasarana ekonomi akibat konflik dalam negeri (Wikipedia, 7/05/2020). REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru dalam rangka mengatasi segala

persoalan ekonomi nasional tersebut. Program jangka pendek ini diorientasikan pada upaya pengendalian inflasi dan rehabilitasi sarana ekonomi nasional, pencukupan kebutuhan pangan nasional serta peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan yang diusung oleh pemerintahan Orde Baru ini dapat dikatakan cukup berhasil mengangkat ekonomi nasional. Hal tersebut dapat dilihat dengan naiknya pertumbuhan ekonomi nasional dari angka 3% menjadi kisaran 6,7% per tahun. Selain itu angka inflasi juga dapat ditekan hingga kisaran angka 47,8% dan pendapatan nasional meningkat dari awalnya 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS pada Replita I. Pada Replita II dan III, Indonesia telah berhasil melakukan swasembada beras dari yang awalnya Indonesia menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia. Pada Replita IV dan V, Indonesia telah mulai menitikberatkan pembangunan nasional pada sektor perindustrian nasional dan berupaya menghasilkan barang-barang ekspor, industri pengolah hasil-hasil pertanian dan industri mesin.

Pembangunan pada era Orde Baru yang cenderung melakukan liberalisasi pada lokus ekonomi nasional telah menghasilkan pengekanan terhadap kesadaran masyarakat dan hanya diarahkan kepada satu titik kesadaran yakni budaya kapitalisme dan pola pikir positivistik terhadap modernisme. Akibat lebih jauh yang dihasilkan oleh hal tersebut adalah memunculkan budaya masyarakat yang cenderung konsumtif dan pemberhalaan terhadap materi. Sehingga muncul anggapan bahwa setiap orang harus mengikatkan diri kepadanya, bagi siapa yang tidak mengikutinya akan ditinggalkan dan terpinggirkan. Eksistensinya pun seolah juga tidak diakui, alhasil kondisi yang demikian tersebut menyebabkan kreatifitas dan pola pikir manusia menjadi semakin tidak berkembang. (warta pinggiran, 8/05/2020).

Pemerintahan model Orde Baru yang berjalan dengan sistem politik yang represif dan otoriter dengan pola pendekatan yang hegemonik telah

menyebabkan ruang publik masyarakat menjadi terberangus akibat dominasi yang sangat kuat oleh negara. Dampak lanjutan yang dihasilkan adalah berkembangnya budaya bisu yang terjadi di masyarakat, sehingga akibatnya proses demokratisasi menjadi terganggu karena budaya kritis masyarakat dibungkam. Pemerintahan Orde Baru yang cenderung menggunakan model paradigma keteraturan yang direpresentasikan lewat ideologi *developmentalisme* membuat sebagian masyarakat termarginalisasi secara hampir sempurna. Paradigma yang digunakan Orde Baru tersebut juga berkonsekuensi logis bagi pemerintah untuk selalu menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial, maka ketika terjadi gejolak sosial sekecil apapun bentuknya harus segera ditekan. Hal demikian ini akan meniscayakan terjadinya proses perubahan sosial. Dalam istilah yang lebih sederhana, Orde Baru telah mengkerdulkan daya dan kekuatan yang ada di masyarakat, sehingga yang terjadi adalah masyarakat sebenarnya mengalami kondisi ketidakberdayaan secara materi bahkan kesadaran.

KH. Abdurrahman Wahid, yang kemudian penulis sebut dengan panggilan Gus Dur, menjadi lentera terang yang muncul ke permukaan saat terjadi carut marutnya kondisi sosial di Indonesia. Gus Dur menjadi salah satu tokoh kunci penting dalam masa-masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru menuju masa reformasi. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden tak lama pasca runtuhnya Orde Baru. Meskipun Gus Dur, semasa beliau menjabat sebagai presiden ke-4 RI yang terhitung cukup singkat, yakni hanya 22 bulan, beliau telah banyak memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Mulai dari naiknya nilai perekonomian negara, menurunnya jumlah kemiskinan, proses demokratisasi negara yang semakin terbuka. (<https://www.youtube.com/watch?v=XU8k-xgc008&t=60s>).

Gus Dur merupakan tokoh yang berperan besar terhadap gerakan *Civil Society* di Indonesia baik ketika beliau tidak sedang menjabat sebagai

seorang presiden maupun ketika menjadi presiden. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Gus Dur lebih diorientasikan kepada pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang unggul untuk kemudian dapat secara mandiri mengembangkan seluruh potensi dirinya guna mencapai kesejahteraan, baik secara individu maupun kelompok (Fathoni, 2017).

Beberapa peranan Gus Dur dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada era 70-an sampai dengan era 80-an dengan membentuk berbagai macam wadah bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Gus Dur membentuk beberapa LSM dan organisasi non politik yang semuanya diorientasikan bagi upaya pembentukan kesadaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Diantara beberapa lembaga yang dibentuk oleh Gus Dur yakni LAKPESDAM (Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia) PBNU, P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), BPR Nusumma (Bank Perkreditan Rakyat) Nusumma dan membentuk Fordem (Forum Demokrasi).

BIOGRAFI KH. ABDURRAHMAN WAHID

KH. Abdurrahman Wahid atau yang sering dikenal dengan sebutan Gus Dur, lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Nama kecilnya adalah Abdurrahman Addakhil, lelaki enam bersaudara ini merupakan putra pertama dari pasangan KH. Abdul Wahid Hasyim dan Nyai Hj Solehah. KH. Wahid Hasyim sendiri merupakan putra dari ulama besar KH. Hasyim Asy'ari pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur (Dwijayanto, 2020). Selain itu KH. Wahid Hasyim juga merupakan Menteri Agama pertama Indonesia pada zaman pemerintahan presiden Soekarno sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Sedangkan sang ibu, Nyai Hj Solehah merupakan putri dari KH. Bisri Samsuri, pendiri pondok pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Selain itu KH. Bisri

Samsuri juga merupakan tokoh NU yang pernah memegang mandate sebagai Rais Aam Syuriah PBNU pasca KH. Wahab Hasbullah (Musa, 2013).

Mewarisi darah pejuang yang berlatarbelakang pesantren, Gus Dur menjalani kehidupan kesehariannya secara sederhana seperti umumnya masyarakat biasa. Gus Dur menikah dengan Nyai Hj Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak, yang kesemuanya perempuan, yakni: Alisa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari (Junaedi, 2006).

Pendidikan Gus Dur dimulai dari pendidikan dasar di SD Matraman Perwari yang terletak tidak jauh dari kediamannya di Jakarta. Pada tahun 1954, Gus Dur melanjutkan pendidikan di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan sambil menjadi santri di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta khususnya di bawah bimbingan K.H. Ali Maksum, mantan Rais Aam PBNU. Pada tahun 1959 Gus Dur mulai menjalani pendidikan penuh di Pesantren, setamat dari sekolah formalnya kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang (Zakki, 2010).

Selama di pesantren Gus Dur mendapatkan banyak pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama dan bahkan dalam waktu singkat mahir dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut. Selain itu karena kemampuan bahasa Inggris Gus Dur yang cukup bagus ia rajin mengkaji pemikiran para sosiolog seperti Karl Marx, Gramsci, Lenin, Mao Zedong, dan tokoh yang lain. Dalam kesehariannya ia telah banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku dari tokoh Barat yang diantaranya *Das Kapital*, Filsafat Plato, Novel-novel William Bouchner, Romantisme Revolusioner dan karangan Lenin. Setelah belajar di Magelang, Gus Dur kemudian melanjutkan menimba ilmu-ilmu agama Islam di pondok pesantren Tambakberas, Jombang saat usianya kurang lebih 20 tahun (Barton, 2010).

Pada tahun 1962 setelah Gus Dur menamatkan pendidikannya di Indonesia beliau kemudian berangkat ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu dua tahun berikutnya Gus Dur berangkat ke Mesir untuk menempuh pendidikan kuliahnya di Universitas Al-Azhar Kairo dengan mengambil jurusan Departement of Higher Islamic and Arabic studies. Setelah selang beberapa lama belajar di Mesir akhirnya pada tahun 1966 Gus Dur melanjutkan studinya di Universitas Baghdad, Irak (Rifai, 2010).

RIWAYAT PEMIKIRAN

Melihat latar belakang Gus Dur baik dari segi keluarga, pendidikan kprah politik dan sosial yang cukup kompleks memberikan gambaran luas bahwa dalam perjalanan Gus Dur meniti jalan hidupnya memang penuh dengan pergolakan. Tetapi justru membuat Gus Dur akhirnya bisa terbuka dan saling bertemu dengan berbagai orang dan kelompok yang beragam latar belakang politik, ideologi, pemikiran, kepentingan, dan strata sosial. Hal ini membuat Gus Dur semakin banyak menangkap fakta-fakta menarik yang tidak didapatkan oleh orang lain dan dari sinilah pemikiran Gus Dur semakin terasah.

Dalam proses pemahaman ideologi dan keagamaan, Gus Dur telah banyak bersinggungan dengan berbagai ragam pemikiran, baik yang ideologis, fundamental, sekuler, modernis hingga tradisional. Sehingga wajar jika kemudian pola pemikiran yang dibangun oleh Gus Dur menjadi sangat luas. Sebagai intelektual Sunni tradisional, Gus Dur membangun pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi diantaranya *pertama*, upaya merevitalisasi khazanah pemikiran Islam ala Ahlussunnah Wal Jama'ah. *Kedua*, turut serta dalam upaya membangun modernitas wacana dan pemikiran. *Ketiga*, berusaha mencari jalan atas persoalan-persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat, khususnya bagi umat Islam Indonesia. Hal ini bisa dipahami bahwa corak pemikiran Gus Dur yang progresif dan inklusif

tersebut sangat dipengaruhi oleh proses pergulatan pemikiran yang begitu panjang terhadap khazanah Islam Ahlussunnah Wal Jamaah yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi (Masdar, 1999).

Mengenai wacana kemanusiaan, pemikiran Gus Dur soal humanisme ini memang sangat dipengaruhi oleh banyak pemikiran-pemikiran dan wacana dari Barat, terutama berasal dari tokoh-tokoh penganut filsafat humanisme. Akan tetapi memang dalam upaya mempraktekkan pemahaman kemanusiaan itu, Gus Dur cukup dipengaruhi oleh beberapa Kyai selama Gus Dur menjalani proses pendidikannya di pesantren. Misalnya KH. Ali Ma'sum Krapyak, Kyai Chudhori Tegalrejo Magelang, Kyai Fatah Tambak Beras Jombang. Dari sinilah kemudian proses pembentukan watak dan karakter Gus Dur terasah secara matang dalam hal kemanusiaan.

Jika dipahami secara lebih jauh, akar pemikiran Gus Dur terbentuk atas persinggungannya dengan tiga model lapisan kultur dan kebudayaan yang berbeda. Pertama, kehidupan pesantren yang sangat hierarkis dan memegang teguh etika yang serba formal serta sangat apresiatif terhadap lokalitas budaya. Kedua, budaya Timur Tengah yang begitu terbuka dan cukup keras dan ketiga adalah budaya Barat yang serba rasional, liberal dan sekuler. Ketiga unsur ini terkristalisasi dalam diri Gus Dur sehingga melahirkan sosok pribadi yang cukup kompleks dan dinamis dalam pola pemikirannya. Hal inilah yang menyebabkan Gus Dur selalu terlihat dinamis dan tidak segera mudah dipahami, dan terkadang kontroversi (INCRES, 2000).

Komitmen Gus Dur sebagai seorang pejuang HAM juga dilakukan dalam upaya pembelaan terhadap kelompok yang tertindas. Hal itu tentu bukan perkara mudah bagi Gus Dur ditengah maraknya politisi karbitan yang serba ingin memperkaya diri melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, Gus Dur tetap tegap berdiri membela hak-hak minoritas kendati hal tersebut tampak tidak menguntungkan dirinya secara politik (<https://islamlib.com/lembaga/nahdlatululama/gus-dur-di-mata-dunia/>).

PERAN GUS DUR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gus Dur merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang kerap diasosiasikan dengan gagasan *civil society*. Sejak dekade 70-an gagasannya dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah banyak dilontarkan dalam berbagai situasi di Indonesia. Ide-idenya menjadi angin segar bagi upaya tercapainya proses perubahan sosial transformatif di Indonesia. Hal tersebut lahir seiring refleksi kritisnya atas kondisi masyarakat yang semakin mengalami ketidakberdayaan akibat sistem yang dibangun semasa pemerintahan Orde Baru yang dinilai terlalu mendewakan pembangunan. Sementara di sisi lain proses pembangunan tersebut tidak serta merta dibarengi dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh Gus Dur setidaknya terdiri dari tiga poin penting yaitu, membangun kesadaran melalui gerakan intelektual, pembangunan sumber daya manusia, dan menciptakan usaha-usaha ekonomi yang diorientasikan kepada kepentingan masyarakat kecil. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh Gus Dur, prinsip kemanusiaan dan keadilan atas hak-hak dasar manusia yang menjadi pondasi utamanya. Hal tersebut menjadi mutlak sebab bagi Gus Dur mengingat Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut disarikan dalam tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) yakni berupa perlindungan atas hak-hak dasar manusia yaitu hak hidup (*hifdz al-nafs*), hak beragama (*hifdz al-din*), hak profesi (*hifdz al-'irdl*), hak berkeluarga (*hifdz al-nasl*) dan hak kepemilikan (*hifdz al-maal*) tanpa membedakan asal usul, ras, agama dan golongan (Arif, 2013).

Selain itu, upaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi keharusan bagi setiap muslim atas posisinya sebagai wakil Allah di

muka bumi. Dan pada sisi lain, Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin yang mengharuskan bagi umatnya untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Itu sebabnya Islam sangat menentang setiap bentuk ketidakadilan dan penindasan oleh siapapun dan di atas institusi apapun (Rohmatulloh, 2015). Di antara upaya dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Gus Dur yakni:

1. Mendirikan Lakpesdam NU

Lakpesdam NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama) adalah salah satu lembaga di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas melakukan kajian-kajian isu strategis dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lembaga tersebut berdiri pada 8 April 1985, yakni pada masa kepemimpinan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Lembaga ini didirikan atas amanah yang muncul dalam Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo (<https://www.nu.or.id/post/read/41229/lakpesdam-pilar-keempat-nu>).

Lakpesdam memiliki fungsi dan peran di antaranya: melakukan kajian-kajian isu strategis keislaman dan keindonesiaan, melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan publik diantaranya dalam hal kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, turut memberikan dukungan data, argumentasi, analisis dan alternatif kepada PBNU dalam perumusan-perumusan kebijakan organisasi, pengimplementasian nilai-nilai ajaran ahlussunnah wal jamaah yang toleran, moderat, menghargai perbedaan dan keragaman, ramah dan berkeadilan, turut memfasilitasi proses kaderisasi di lingkungan NU, mendinamisasi upaya pemberdayaan masyarakat, mengelola pengetahuan dan sumber-sumbernya guna melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Mendirikan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)

LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) adalah sebuah organisasi independen dan nirbala yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan ajaran Islam yang transformatif yang berpihak teradap keadilan dan kemajemukan serta berbasis nilai-nilai keindonesiaan. LKiS didirikan pada tahun 1992 yakni pada masa-masa menguatnya dominasi pemerintahan Orde Baru. Yayasan tersebut saat ini beralamatkan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yayasan tersebut dibentuk oleh sekelompok aktivis yang lahir dari kultur Islam tradisional yang cukup aktif berdiskusi dan mengembangkan pemikiran transformatif. Beberapa diantaranya adalah Farid Wajidi, Hairus Salim dan Gus Dur sebagai pelopor berdirinya yayasan ini (<http://www.lkis.co.id>).

Selama ini, LKiS lebih di kenal oleh masyarakat hanya pada posisinya sebagai sebuah penerbit buku-buku Islam progresif. Akan tetapi pada kenyataannya LKiS ternyata bukan hanya sekedar penerbit buku. Ia merupakan sebuah LSM yang bergerak dalam banyak bidang. Setidaknya ada tiga isu utama yang menjadi perhatian LKiS selama ini yaitu tingginya konflik sosial di semua lapisan, lemahnya pemberdayaan masyarakat dan tingginya angka intoleransi. Sementara isu utama yang sedang digarap dan ditekuninya diantaranya menyangkut soal pluralisme, wacana anti kekerasan dan demokrasi (<http://www.lkis.co.id>).

3. Membentuk Forum Demokrasi (Fordem)

Saat menjelang akhir kekuasaanya, Soeharto mencoba meraih simpati umat Islam dengan mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang diketuai oleh B.J Habibie. Saat itu, hampir semua intelektual muslim bergabung dengan organisasi tersebut. Namun langkah yang diambil oleh Soeharto ini mendapat penentangan yang keras dari Gus Dur. Gus Dur beranggapan bahwa pembentukan organisasi tersebut justru akan membangkitkan kembali politik

sektarian. Selain itu, ICMI juga dinilai sangat sarat akan kepentingan politik Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya.

Respon penolakan Gus Dur terhadap ICMI tersebut tidak hanya sebatas pada wacana semata. Dalam catatan Adnan Buyung Nasution, Gus Dur dengan tegas mengingatkan Soeharto bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol kelompok umat Islam militan melalui organisasi ini justru akan menjadi bumerang bagi Soeharto. Gus Dur berpendapat pemerintah perlu mengembangkan sikap toleransi beragama yang berlandaskan kebebasan beragama dan kepercayaan. Akhirnya Gus Dur bersama beberapa tokoh lainnya yang diantaranya Adnan Buyung Nasution, Marslam Simanjutak, Arief Rahman, Bondan Gunawan serta Rahman Tolleng membentuk Fordem (Forum Demokrasi) sebagai salah satu kritik terhadap kebijakan Soeharto tersebut (Nasution, 2011).

Berbeda dengan ICMI, Fordem dibentuk dengan tujuan melakukan disemensi gagasan demokratis pada masyarakat yang lebih luas. Selain tujuan tersebut, pendirian Fordem juga dimaksudkan untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap masyarakat yang mengalami ketertindasan akibat rezim kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan hegemonik. Melihat gelagat yang tidak enak ini akhirnya pemerintah mulai bersikap menekan terhadap Gus Dur, sebagai semisal menjelang pemilu 1992, pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh di Fordem akhirnya dibubarkan pemerintah (Musa, 2013). Gus Dur berpendapat bahwa pembentukan Fordem tersebut juga didasari ketidakinginannya jika suara umat Islam hanya dijadikan label untuk melanggengkan kekuasaan. Demikian pula dengan cendekiawan muslim, Gus Dur berpendapat bahwa tidak selayaknya cendekiawan berdiri pada posisi sebagai label kekuasaan (<https://www.nu.or.id/post/read/74770/mengapa-gus-dur-membentuk-fordem>).

4. Membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden RI, salah satu PR terbesar yang dihadapi adalah masalah perekonomian nasional yang carut marut akibat terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998. Langkah yang diambil oleh Gus Dur untuk mengatasi krisis dan melakukan perbaikan kondisi ekonomi nasional adalah dengan membentuk DEN (Dewan Ekonomi Nasional) dengan tugas sebagai berikut: yang pertama, Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada Presiden untuk saran tindakan lanjutnya. Kedua, Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. Ketiga, melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional (Keppres No. 144 tahun 1999). Namun DEN ini tidak berlangsung lama keberadaannya. Pada tahun 2000 melalui Keppres No. 122, keberadaan DEN dicabut. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari. (<http://wartasejarah.blogspot.com/2014/12/kh-abdurrahman-wahid>)

5. Mendirikan Bank Perkreditan Rakyat

BPR Nusumma didirikan oleh PBNU yang saat itu diketuai oleh Gus Dur yang bekerjasama dengan Bank Summa milik Edward Soeryadjaya pada tanggal 1 Juni 1990 di Jakarta. BPR Nusuma ini didirikan guna membangun jaringan bank pedesaan, mengelola dana pedesaan, yang di mana wilayah tersebut merupakan basis dari jamaah NU. Selain itu masyarakat NU yang mayoritas dengan jumlah besar memiliki usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, mebel, dll, maka bank tersebut juga diprioritaskan untuk pinjaman produktif masyarakat. Maka dengan adanya bank tersebut usaha-usaha yang dilakukan itu dapat tersokong dan lebih produktif. Pada tahun awal berdirinya, bank ini mendapatkan dukungan penuh dari NU. Akhirnya pada bulan agustus tahun 1990 bertempat di pondok Tebu

Ireng, Jombang diresmikan pembentukan 9 cabang bank Nusumma. Keseluruhan bank tersebut berlokasi di Jawa dan mulai beroperasi pada tanggal 11 November 1990. Selain itu, pada periode tersebut juga berhasil didirikan lagi satu cabang yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 1992 bank tersebut berhenti beroperasi. Sehingga akhirnya pemegang saham dari bank tersebut berpindah tangan ke Dahlan Iskan selaku pemilik Jawa Pos Group, sebuah grup media terbesar di Jawa Timur. Dan kemudian melalui tangan Dahlan inilah bank tersebut berkembang pesat dengan dibuka banyak cabang di seluruh Indonesia (<https://banknusumma.co.id>).

6. Mendirikan Partai Politik

Pasca runtuhnya Orde Baru peta politik nasional berubah sangat drastis, era reformasi telah banyak melahirkan puluhan partai politik yang salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saat itu posisi Gus Dur sedang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, atas desakan dari masyarakat NU saat itu yang menghendaki NU membentuk partai politik, akhirnya partai ini lahir. Secara terbuka Gus Dur mengakui bahwa salah satu fungsi partai ini adalah dalam rangka melawan dominasi Golkar dalam pemilihan umum. PKB secara resmi dibentuk dan dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di Pondok Ciganjur milik Gus Dur. Sebagai deklarator yaitu KH. Mustofa Bisri, KH. Muchid Muzadi, KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat dan tentu saja Gus Dur (Musa, 2013).

Pada pemilu legislatif pada bulan Juni 1999 PKB secara resmi mengikuti pemilu. Pada pemilu tersebut PKB mendapatkan suara sebanyak 12%. Yang itu kalah jauh dengan suara PDIP yang memenangkan suara dengan perolehan 33% suara. Dengan begitu perkiraan PDIP akan menang dalam pemilihan presiden cukup besar. Akan tetapi kekuatan PDIP tidak memiliki mayoritas suara, hal tersebut kemudian memaksa PDIP menjalin koalisi dengan PKB. Pada bulan juli,

PAN melalui Amin Rais membentuk poros tengah yang terdiri dari partai-partai Islam. Melalui poros tengah inilah yang kemudian mengangkat Gus Dur menjadi Calon Presiden RI sehingga menyebabkan koalisi PKB dan PDI mulai goyah (Musa, 2013).

Pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR resmi melakukan sidang, akhirnya salah satu keputusan sidang ini adalah menetapkan Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4 dengan perolehan suara sebanyak 373 suara. Mengalahkan Megawati yang saat itu hanya memperoleh 313 suara. (Musa, 2013).

7. Dinamisasi dan modernisasi pesantren

Gus Dur berpendapat orientasi pendidikan pesantren yang dinilai begitu sempit mesti dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurutnyanya selama ini pendidikan pesantren hanya berorientasi kepada pembentukan bibit-bibit ulama semata. Gus Dur mengungkapkan bahwa pesantren yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk pengembangan sumber daya manusia harus memiliki orientasi yang lebih luas. Selain orientasi penumbuhan bibit-bibit ulama, Gus Dur mengharapkan bahwa pengetahuan agama yang diajarkan selama ini di pesantren harus juga dapat digunakan sebagai landasan menempuh karir tertentu. Sehingga dengan begitu adopsi terhadap ilmu-ilmu modern seperti komputer, bahasa dan fisika, juga harus diajarkan dalam kurikulum pendidikan pesantren. Dengan kata lain, selain berorientasi mencetak ulama, pesantren memiliki peran penting untuk mencetak generasi-generasi yang memiliki keahlian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. (Wahid, 2001).

Berangkat dari argumentasi yang demikian tersebut, maka ia sangat setuju dan mendorong agar pendidikan pesantren dapat diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional. Meskipun sebenarnya posisi pesantren masih berada jauh di luar itu. Gus Dur beranggapan bahwa prospek pendidikan pesantren akan buruk jika tidak ada upaya untuk

meleburkan diri untuk menjadi bagian dari pendidikan nasional. Menurutny yang menjadi alasan terhadap kondisi demikian ialah bahwa anak didik tidak akan merasa memiliki ketertarikan terhadap pendidikan pesantren ketika kondisinya masih terlalu sibuk untuk hanya berorientasi sempit dan belum mampu memiliki wawasan nasional yang lebih. (Wahid, 2001).

8. Komitmen pembelaan HAM dan Keadilan

Dalam poin terakhir ini terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Gus Dur sebagai bagian dari komitmennya untuk membela hak asasi manusia dan keadilan. Di antaranya sebagai berikut: Pertama, pembelaan terhadap etnis Tionghoa. Semasa pemerintahan Orde Baru, harus diakui bahwa keadaan tidak berpihak kepada kelompok etnis Tionghoa di Indonesia. Pasalnya pemerintah saat itu mengeluarkan kebijakan yang isinya adalah melarang setiap aktifitas kebudayaan, tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa etnis Tionghoa dinilai masih menjadi bagian dari sarana penyebaran paham komunisme yang juga dianut oleh negara Cina. Maka jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan akan menyebabkan bangkitnya kelompok komunisme di Indonesia yang dalam catatannya telah beberapa kali melakukan pemberontakan di mana-mana.

Pada saat Orde Baru lengser dan seiring naiknya Gus Dur sebagai presiden RI, akhirnya pada tahun 2001 ia mengeluarkan kebijakan yang isinya adalah menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional, layaknya hari-hari raya lainnya di Indonesia. Tidak hanya itu ia juga melakukan pencabutan terhadap Inpres No. 12 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat China serta kemudian mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000 yang menetapkan agama Konghucu sebagai agama nasional ke-6. Kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur ini mendapatkan respon yang sangat gembira dari etnis

Tionghoa. Sehingga akhirnya Gus Dur digelar sebagai bapak Tionghoa (Suryadinata, 2014).

Kedua, pencabutan Tap MPRS No. XXIX/MPR/1966 tentang pelarangan ajaran Marxisme dan Leninisme di Indonesia. Upaya yang coba dilakukan oleh Gus Dur tersebut sontak saja mendapat respon keras dari banyak golongan. Pasalnya sejarah telah mencatat bahwa kelompok komunis telah menciderai konstitusi dengan melakukan pemberontakan. Akan tetapi Gus Dur berpendapat lain, ia beranggapan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan HAM dan tidak sesuai dengan pengamalan UUD 1945 yang pada poinnya negara harus melindungi seluruh warga negaranya. Meskipun akhirnya kebijakan tersebut gagal, akan tetapi melalui keberanian Gus Dur tersebut telah membukakan kesadaran masyarakat untuk menegakkan demokrasi dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok dan golongan apapun (Hasan, 2010).

Ketiga, Refrendum Aceh. Saat terjadinya konflik yang melibatkan kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan TNI banyak terjadi kasus penculikan, pembunuhan dan perampasan di Aceh. Gus Dur melihat bahwa keadaan tersebut akan berdampak sangat buruk terhadap keutuhan NKRI. Saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur mengeluarkan kebijakan berupa refrendum bagi Provinsi Aceh. Meskipun hal tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak, akan tetapi Gus Dur memiliki pendapat bahwa dalam menyelesaikan konflik di Aceh tersebut tidak selayaknya dilakukan dengan kekerasan fisik. Akan tetapi harus dengan pendekatan kemanusiaan. Alhasil upaya Gus Dur tersebut dinilai cukup berhasil untuk menghentikan konflik yang berlangsung cukup lama tersebut. (Daris, 2016).

9. Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial

Saat Gus Dur naik menjadi presiden, harapan masyarakat Indonesia agar adanya sosok pemimpin yang jujur, adil dan amanah muncul dari mana-mana. Upaya Gus Dur untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut

salah satunya dengan melakukan perampangan kabinet kerja dalam pemerintahannya. Tercatat setidaknya ada dua lembaga yang dibubarkan oleh Gus Dur. Adapun dua lembaga tersebut ialah Departemen sosial dan departemen penerangan. Adapun alasan dibubarkannya Departemen Sosial ialah karena Gus Dur beranggapan bahwa Departemen Sosial yang seharusnya membantu kehidupan masyarakat justru dijadikan sarang bagi para koruptor. Sedangkan untuk Departemen Penerangan, Gus Dur beranggapan bahwa dengan adanya departemen tersebut membuat kebebasan pers menjadi hilang. Akibatnya lembaga pers tidak mampu melakukan pengembangan diri. Selain itu, departemen ini dinilai masih cukup kuat aroma Orde Barunya (Yustina, 2008).

KESIMPULAN

Hampir seluruh akar pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang pemberdayaan sesungguhnya didasarkan pada komitmen kemanusiaan dalam ajaran Islam. Ajaran Islam tentang komitmen kemanusiaan dalam pandangan Gus Dur digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tuntutan persoalan social dalam kehidupan masyarakat modern dan plural sdi Indonesia. Sublimasi nilai keagamaan dan kemanusiaan Gus Dur dipengaruhi dari tradisi pesantren yang sangat memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, moderasi dan keseimbangan. Selain itu pengalaman Gus Dur dalam bersosialisasi dengan banyak tokoh turut memberikan andil besar dalam memunculkan kesadaran ini. Sehingga konsep pemberdayaan oleh Gus Dur merupakan suatu jalan untuk mewujudkan prinsip *islam rahmatan lil 'alamin* yakni kemaslahatan bersama sesuai dengan apa yang menjadi ajaran dan doktrin dalam ajaran syari'at Islam. Dengan demikian, Gus Dur mengharapkan terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki jati diri

humanis, sadar akan potensi diri dan memiliki kemandirian dalam segala bidang.

REFERENSI

- Arif, Syaiful. (2013). *Humanisme Gus Dur, Pergumulan Islam Dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Barton, Greg. (2010). *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, Yogyakarta: LKiS
- Daris, Laurentius Rigen. 2016. *Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Tahun 1999-2001, Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Dwijayanto, Arik & Yusmicha Ulya Afif. (2020). A Religious State (A Study of Hasyim Asyari and Muhammad Iqbal's Thought on the Relation of Religion, State and Nationalism). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 226-235.
- Fathoni, Khoirul. (2017). *DEMOKRASI POLITIK (Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Menurut Gus Dur)*, Tesis, Pascasarjana IAIN Ponorogo.
- Hasan, Kamaruddin. (2010). *Propaganda Politik di Indonesia Era Abdurrahman Wahid*,
<https://repository.unimal.ac.id/2307/1/05.%20HANDOUT%20PRAKTIK%20DAN%20TEKNIK%20PROPAGANDA%20%205.pdf>
- Junaedi, Dedy. (2000). *Beyond the Symbol: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, Bandung: Rosdakarya,
- Keppres No. 144 tahun 1999.
- Masdar, Umaruddin. (1999). *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Musa, Ali Masykur. (2013). *Pemikiran Dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nasution, Adnan Buyung. (2011). *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rifai, Muhammad. (2010). *Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Rohmatulloh, D. M. (2015). Gus Dur tentang Islam dan Pancasila. In Tabloid Publica Pos Edisi V (p. 9). Publica Media Utama.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4544207>
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Suryadinata, L. (2014). Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?. *Antropologi Indonesia*, North America,
Available at: <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3464>. Date accessed: 16 Feb. 2020.
- Tim INCReS, (2000). *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikira dan Gerakan Gus Dur*, Bandung: PT Remaja Rosdakaryah,
- Wahid, Abdurrahman. (2001). *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS.
- Yustina, Yastri. (2008). Kebijakan Politik Gus Dur Sebagai Presiden RI ke-4 Terhadap Referendum Aceh, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora Uin Syarif Hidayatullah, 2008.
- Zakki, Muhammad. (2010). *Gus Dur Presiden Akhirat*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.

Website:

<https://www.nu.or.id/post/read/41229/lakpesdam-pilar-keempat-nu>
<https://www.nu.or.id/post/read/74770/mengapa-gus-dur-membentuk-fordem>.

<https://islami.co/gus-dur-dan-gagasan-pemberdayaan/>
<https://islamlib.com/lembaga/nahdlatululama/gus-dur-di-mata-dunia/>
[https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/06060031/peran.gus.dur.d
i.balik.kemeriahan.imlek.?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/06060031/peran.gus.dur.d
i.balik.kemeriahan.imlek.?page=all)
<http://wartasejarah.blogspot.com/>
<https://banknusumma.co.id>
[https://id.wikipedia.org/wiki/Orde Baru#cite note-
FOOTNOTEMustofa Sh.20098-11.](https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru#cite_note-FOOTNOTEMustofa_Sh.20098-11.)
[http://wartapinggiran.blogspot.com/2018/01/paradigma-kritis-
transformatif-oleh-nur.html](http://wartapinggiran.blogspot.com/2018/01/paradigma-kritis-
transformatif-oleh-nur.html)
<https://www.youtube.com/watch?v=XU8k-xgc008&t=60s>